

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Dalam Definisi umum, Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan. Sedangkan kata Historis berasal dari Bahasa Yunani yakni “*Istoria*” yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan manusia yang disusun dalam urutan kronologis.

Menurut definisi umum, kata *history* (Inggris) berasal dari kata benda Yunani *Istoria* yang berarti ilmu. Menurut definisi secara umum, kata *history* kini berarti “masa lampau umat manusia”. Adapun pengertian Historis atau sejarah adalah deskripsi tentang keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. DR.

Moh. Hatta berpendapat:

Sejarah ujungnya mengenai pengertian dari masa yang lampau, ia menggambarkan di muka kita suatu tipe bentuk rupa dari masa itu, bukan gambar yang sebenarnya, tapi gambaran yang dimudahkan. Ia bukan melahirkan cerita dari kejadian yang lalu, tetapi member pengertian tentang kejadian satu sama yang lain, dengan mengemukakan kejadian atau masa itu sebagai masalah. Ia mengemukakan masalahnya dalam keadaannya yang heterogen (dalam keadaannya yang banyak cabang). Siapa yang mempelajari sejarah dengan pengertian, tak boleh berputus asa,

karena sejarah mengajar kita yang relatif sementara. Tak ada yang berubah, “panta rei” semuanya mengalir kata Heraclitus, “masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah” (Moh. Hatta, dalam H. Rustam Tamburaka. 1999:15).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dapat dibuktikan dengan fakta kebenarannya dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan sejarah.

Dengan demikian tinjauan historis dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian terhadap peristiwa masa lampau yang ditulis secara ilmiah dan sistematis menurut kejadian suatu peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya.

2. Konsep Upaya Lobby HMI kepada Presiden Soekarno

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).

Menurut Cholichul Hadi dalam Upaya Individu Dalam Menggapai Impian pada [http//. cholichul-fpsi](http://.cholichul-fpsi), Upaya merupakan salah satu bentuk perilaku manusia. Sehingga dalam kehidupan manusia selalu melakukan upaya sepanjang hidupnya karena manusia tidak mungkin hidup tanpa tujuan karena manusia selalu memiliki kebutuhan, terutama kebutuhan hidup yang utama.

Upaya merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran.

Adapun yang dimaksudkan upaya disini adalah untuk meneliti upaya lobby HMI kepada Presiden Soekarno.

Pasca meletusnya G 30 S/PKI PB HMI menyambut ajakan Bung Karno di Istana Bogor Pada 18 Desember 1965 untuk meleraikan pertumpahan darah atau pembunuhan-pembunuhan serta diskriminasi terhadap orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu-menahu yang telah menjadi korban pembunuhan. Beberapa kali PB HMI menyelenggarakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno atas rujukan dari Presiden Soekarno dalam menanggapi situasi ini. (Alfan Alfian, 2013:99)

Bung Karno menyampaikan keprihatinannya pasca pergolakan G 30 S/PKI. PB HMI dalam lobby-lobby politiknya menyampaikan bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika PKI harus dibubarkan. PB HMI juga berpandangan bahwa Ideologi Komunis tidak sesuai dengan jiwa kepribadian Bangsa Indonesia. PB HMI juga menginginkan bahwa pejabat-pejabat tinggi di lingkungan kabinet yang berhaluan PKI untuk segera dicopot dari jabatannya.

Dalam upaya lobby-lobby politik tersebut PB HMI diwakili oleh Mar'ie Muhammad, Ekky Syahrudin, Firdaus Wadji, Nurcholish Madjid, Syam Alamsyah, Azis, serta dr. Sulastomo. Selain itu peran tokoh-tokoh senior HMI yang duduk dalam kabinet Dwikora turut mengantarkan serta membantu memediasi PB HMI terhadap Presiden Soekarno. Turut hadir tokoh-tokoh senior HMI pada pelaksanaan lobby kepada presiden Soekarno diantaranya A. Dahlan Ranuwihardjo S.H (anggota Dewan Pertimbangan Penasehat (DPP) PB HMI/Anggota DPR GR/MPRS), Nabhani Misbach, dan Ir. H.M. Sanusi.

Bagaimanakah sesungguhnya sikap Bung Karno terhadap G 30 S/PKI? Menyimak pidato Bung Karno pada Sidang Kabinet Tanggal 22 Desember 1965, sebagaimana dicatat Oei Tjoe Tat;

“jangan ragu-ragu dan khawatir saya dalam pengaruh Dewan Revolusi. Saya tidak akan tunduk padanya (PKI).

.

Geharewar (hingar bingar) ini supaya ditenangkan dulu, baru kemudian diadakan *polietieke oplossing* (pemecahan politik). “*Veroordel de wreedheid* (adililah kekejaman), tetapi revolusi harus diselamatkan.(Oei Tjoe Tat dalam A. Afandi; 2011:339)

Pada Sidang Kabinet Akhir Desember 1965 di Bogor, Presiden Soekarno kembali berpidato ;

“supaya ada ketenangan, proolog bisa dipelajari dengan tenang. Kejadiannya sendiri pada 30 September itu memang bukan hanya persoalan Angkatan darat saja sehingga beberapa Jenderal terbunuh terutama persoalan politik. Maka harus ditinjau dari sudut politik, dari revolusi. Harus juga dipelajari dengan tenang.

“saya perintahkan kepada semua untuk tidak memanaskan keadaan. Partai-partai yang turut membakar akan dibubarkan. *De Revolutie is at stake*. (Revolusi sedang dipertaruhkan). Aku memang lagi memikirkan pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Ketetapan hati saya; als jullie mij nog lusten, behoud mij! Zo niet, gooi mij eruit (kalau kalian masih menyukai saya, pertahankan saya, kalau tidak, lempar saja saya keluar). Jangan ikut-ikutan membakar, umpama katanya penis dipotong-potong dengan 100 silet.(Oei Tjoe Tat dalam A. Afandi; 2011:341)

3. Konsep Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lobby HMI kepada Presiden Soekarno

Menurut Definisi Umum faktor adalah; hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu: *untuk menjadi atlet yg tangguh, kemampuan fisik, ketahanan mental, dan semangat juang merupakan -- yg sangat menentukan;*

Menurut Hasan Alwi dkk, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (Hasan Alwi dkk, 2005;312 Dalam Sekripsi Upik F Pendidikan Sejarah 07).

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya lobby HMI kepada Presiden Soekarno dibagi menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor Internal yang terdiri dari;
 1. Doktrin Perjuangan HMI.
 2. Rapat Pleno PB HMI pada Desember 1965.
 3. Keikutsertaan Tokoh-Tokoh Senior HMI dalam kabinet dan Angkatan Darat.
- b. Faktor eksternal yang terdiri dari ;
 1. Sikap Presiden Soekarno terhadap PKI.
 2. Dukungan Tokoh-Tokoh Petinggi Angkatan Darat kepada HMI.
 3. Upaya-Upaya PKI untuk membubarkan HMI.

4. Konsep Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 1947. HMI merupakan organisasi pengkaderan mahasiswa. DR. H Nurcholish Madjid (Cak Nur), mengatakan bahwa HMI adalah kumpulan dari pribadi-pribadi yang sedang tumbuh mekar. (Nurcholish Madjid dalam Agus Salim Sitompul, 2008; VIII).

Lebih lanjut Nurcholish Madjid (dalam Agus Salim Sitompul, 2008; VIII) mengatakan;

ide-ide dan wawasan-wawasan strategis HMI melalui pribadi-pribadi para pimpinan dan anggotanya banyak yang masih bersifat embrionik yang perlu dipersemaikan dan dipelihara lebih lanjut untuk dapat ditumbuhkan menjadi sistem pemikiran yang utuh dan padu. Tugas para “insan akademis yang bernafaskan Islam” yang pencetakannya justru merupakan tujuan utama HMI.

Untuk mencapai misi yang diemban, HMI memiliki doktrin perjuangan yang mampu membangkitkan pola pikir kader dalam mencapai arah tujuannya. Selain Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), HMI juga mempunyai landasan perjuangan yakni (1) Pemikiran ke-Islaman dan ke-Indonesiaan HMI; (2) Tafsir Tujuan; (3) Tafsir Independensi; (4) Memori penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI, dan (5) Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP). (Solichin, 2010 ;147)

HMI mempunyai jenjang pentrainingan serta materi-materi training yang kesemuanya sebagai penunjang guna menciptakan insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernafaskan Islam. Jenjang pentrainingan dalam HMI meliputi Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca), *Basic Training* (Latihan Kader 1),

Intermediate Training (Latihan kader II), *Advance Training* (Latihan Kader III), serta training-training lainnya yang bersifat formal maupun informal.

HMI ibarat sebagai kawah candradimuka tempat dan proses kaderisasi mahasiswa untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia. Implementasi dari pengkaderan itu sendiri yaitu pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual atau kemampuan ilmiah, pengembangan kemampuan profesional atau keterampilan. (Solichin, 2010; 44).

Kader HMI digambarkan sebagai tipe konseptor, tipe *solidarity maker*, tipe *problem solving*, tipe *administrator*, dan tipe negarawan. Hal ini mengingat sebagai arah petunjuk potensi dari seorang kader HMI. HMI adalah organisasi mahasiswa terbesar serta tertua di Indonesia. Selain berfungsi sebagai organisasi kader. HMI juga berfungsi sebagai organisasi perjuangan. (Alfan Alfian, 2013;VIII).

Sebagai organisasi kader, HMI menitik beratkan kepada budaya intelektual serta pengembangan diri para kadernya. Pengembangan secara aspek keilmuan serta organisatoris sebagai modal yang berharga dalam strategi *survive* HMI dalam menghadapi problema-problema yang ada pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai organisasi perjuangan, perkembangan pemikiran sebagai implementasi di dalam melakukan perubahan, serta mengembalikan kepada tataran yang ideal, HMI juga berkuat kepada pemecahan masalah yang terjadi pada lingkungan masyarakat serta meresponnnya dengan cara pendekatan kepada masyarakat serta pendekatan birokrasi wilayah setempat sehingga tercapai suatu bentuk pemecahan masalahnya.

Lebih lanjut menurut Mahfud MD (dalam Alfian Alfian, 2013:3) mengatakan;

Politik merupakan sesuatu yang bukan “wilayah yang haram” bagi HMI, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi. HMI yang sebagai ormas mahasiswa adalah gerakan politik mahasiswa Islam yang tidak berbentuk partai politik. Perjuangan politik bagi HMI bukan merupakan perjuangan memperebutkan wilayah kekuasaan. Perjuangan politik yang dilakukan HMI adalah perjuangan berdasarkan nilai-nilai kebenaran (*hanif*). Bagi HMI apabila terjadi suatu pergeseran ataupun terjadi sesuatu hal permasalahan dalam Bangsa Indonesia, HMI mempunyai tanggung jawab moral untuk dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan daripada HMI.

Bagi HMI konsep ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan satu bagian kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Islam pun mengajarkan bagaimana rasa cinta kepada tanah air. Artinya pemahaman terhadap ke-Islaman HMI tidak terlepas daripada konsep ke-Indonesiaan.

Jadi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi pengkaderan mahasiswa yakni tempat penggodogan dan penempatan mahasiswa dalam tujuan terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernafaskan Islam. Selain sebagai organisasi pengkaderan HMI juga sebagai organisasi perjuangan, *control social*, serta sebagai organisasi pergerakan politik mahasiswa untuk memperjuangkan tata masyarakat serta tata nilai ke-Indonesiaan apabila terjadi hal ketimpangan atau pergeseran dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Konsep Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok sebelum akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Sebuah organisasi awal yang penting didirikan

oleh sosialis Belanda Henk Sneevliet dan Sosialis Hindia lain yang pada dasarnya membentuk tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dibawah nama *Indies Social Democratic Association* (dalam bahasa Belanda: *Indische Sociaal Democratische Vereeniging*-, ISDV). ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial.

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris, bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai pada kongres kedua Komunis Internasional 1921.

Pada periode menjelang kongres keenam Sarekat Islam pada tahun 1921, anggota menyadari strategi Sneevliet dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Agus Salim, sekretaris organisasi, memperkenalkan sebuah gerakan untuk melarang anggota SI memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain di kancan perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggot komunis kecewa dan keluar dari partai, seperti oposisi dari Tan Malaka dan Semaun yang juga keluar dari gerakan karena kecewa untuk kemudian mengubah taktik dalam perjuangan pergerakan indonesia. Pada saat

yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik, dan Sarekat Islam memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama, meninggalkan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasionalis yang aktif.

Bersama Semaun yang berada jauh di Moskow untuk menghadiri *Far Eastern Labor Conference* pada awal 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia. Hal ini ternyata gagal, Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan antara pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih yang terakhir dan berangkat ke Rusia.

Pada Mei 1922, Semaun kembali setelah tujuh bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi. Pada tanggal 22 September, Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (*Persatuan Vokbonded Hindia*) dibentuk. Pada kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa "prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh" karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). ([www. Wikipedia Indonesia.com](http://www.WikipediaIndonesia.com))

6. Konsep Pembubaran PKI

Menurut Definisi Umum pengertian pembubaran adalah proses, perbuatan, atau cara membubarkan. Jadi Konsep Pembubaran PKI adalah cara atau upaya dalam membubarkan PKI.

Seperti diketahui bahwa tuntutan pembubaran PKI merupakan tuntutan bagi ormas-ormas serta rakyat yang sudah marah melihat kekejaman yang dilakukan PKI baik pada peristiwa G 30 S/PKI maupun peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan PKI di daerah-daerah. Tuntutan ini serentak bergerak reaksi spontan dari rakyat untuk menentang penyelewengan/pengkhianatan/pemberontakan kontra revolusi Gestapu/PKI.

Rex Mortimer (2011; 24) dalam bukunya *Indonesian Communism under Soekarno, Ideology and Politics 1959-1965* mengatakan;

Ideologi Komunis dianggap tidak relevan dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia. Komunisme dianggap sebagai paham yang tidak mengenal konsep-konsep berkeTuhanan, dilain itu komunis merupakan suatu paham yang memusuhi agama. Selain itu, PKI juga telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Pancasila.

Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Disamping sebagai pandangan hidup yang berisi nilai-nilai luhur Pancasila juga menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKI yang menganut Marxisme/Leninisme dalam usaha mengkomuniskan Indonesia, cita-citanya hanya dapat dilaksanakan melalui pemerintahan diktator-proletariat, dan untuk itu PKI dengan tidak segan-segan untuk mengambil jalan kekerasan atau kudeta sekalipun. Ideologi komunis merupakan ideologi *monolitik* yang tidak dapat berdampingan dengan aliran politik maupun dalam aliran beragama serta kepercayaan. Hal ini sangat sekali berbeda dengan Ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi terhadap pluralisme. (Rex Mortimer, 2011:24)

Pada Maret 1966 diadakan Sidang MPRS. Dalam Sidang MPRS dikukuhkan sebagai Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, Inilah keputusan pertama yang diambil dengan menggunakan Surat perintah 11 Maret tentang pembubaran dan melarang PKI dan organisasi massanya serta melarang paham komunisme, marxisme, serta leninisme berkembang di Indonesia. (Solichin, 2010 ;93)

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang penulis coba kembangkan adalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno tentang pembubaran PKI Tahun 1965. Faktor-faktor yang melatarbelakangi HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno penulis bagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal serta faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor-faktor yang muncul dari internal organisasi untuk melakukan lobby. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul dari luar organisasi yang mendorong HMI melakukan upaya lobby politik.

Faktor-faktor internal organisasi yang menyebabkan HMI melakukan upaya lobby yaitu; Doktrin perjuangan HMI, Rapat Pleno PB HMI pada Desember 1965, serta keikutsertaan tokoh senior HMI dalam cabinet dan Angkatan Darat. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno yakni; Dukungan Tokoh-tokoh Angkatan Darat (AD) kepada HMI, Sikap Presiden Soekarno terhadap PKI, serta keinginan PKI untuk membubarkan HMI untuk memotong pengkaderan HMI dalam mencetak cendekiawan muslim.

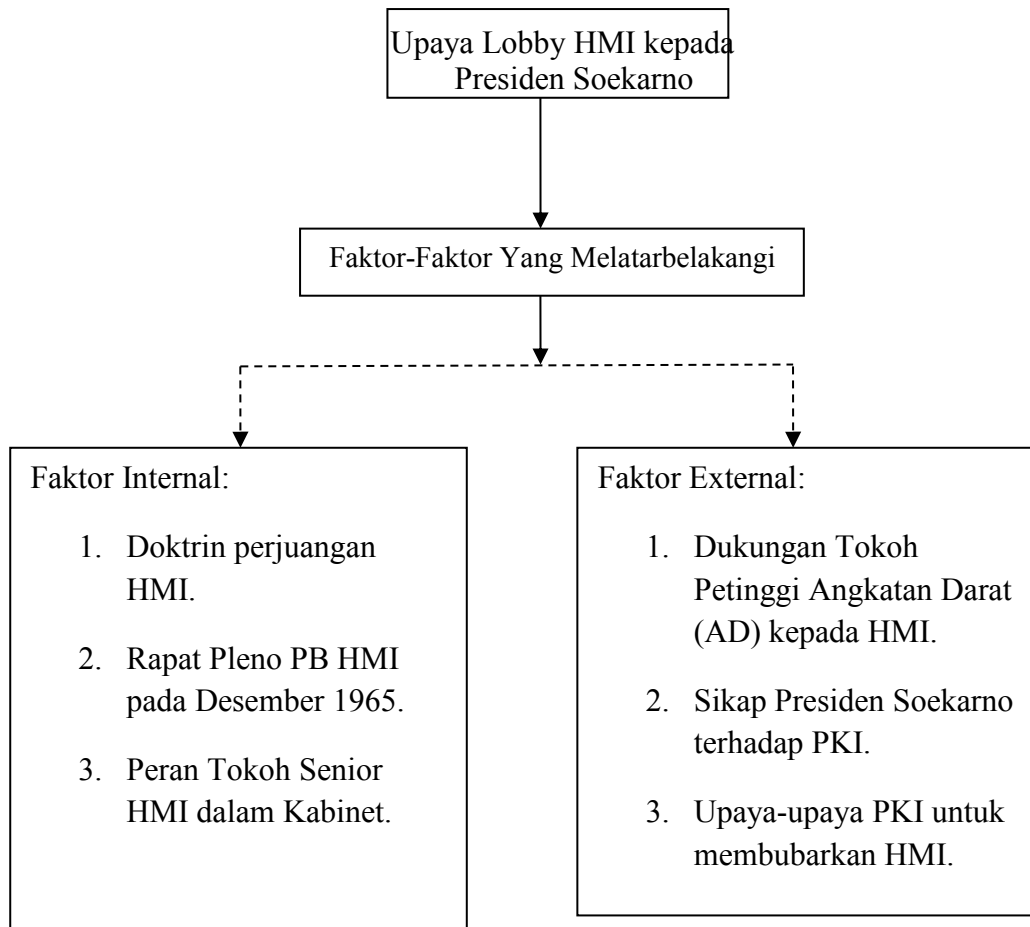
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai ormas mahasiswa dalam gerakan politik mahasiswa islam yang tidak berbentuk partai politik. Orientasi dalam menentang paham komunis berkembang di Indonesia mengandung pengertian bahwa organisasi ini harus berjuang melalui gerakan politik.

Meskipun HMI adalah organisasi mahasiswa yang tidak terjun dalam dunia politik praktis, namun suasana waktu itu tidak memungkinkan HMI melepaskan diri dari masalah politik. Hal ini untuk mempertahankan peranan politik HMI dalam

mengupayakan tata nilai dan aspek kebijaksanaan politik tanpa memasuki lembaga-lembaga formal politik. Esensi sebagai kekuatan moral merupakan pegangan yang utama dalam langkah perjuangan HMI.

Tujuan HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI karena menurut HMI paham komunis tidaklah sesuai dengan prinsip jiwa kepribadian Bangsa Indonesia. Pengkhianatan G 30 S/PKI terhadap Bangsa Indonesia merupakan peristiwa makar terhadap keutuhan NKRI. Bagi HMI jelas dasar yang paling tepat bagi Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah titik temu Bangsa Indonesia dan sebagai sumber kehidupan bernegara.

C. Paradigma



————▶ garis faktor pengaruh/tinjauan

-----▶ garis hubungan

REFERENSI

Tamburaka, Rustam. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat & Iptek*. RINEKA CIPTA ; Jakarta. Halaman 15

[http://www. Pengertian Lobby. Com](http://www.PengertianLobby.Com)

Huntington P. Samuel. 2006. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Penerbit Rineka Cipta; Jakarta. Halaman 265

[http:// Langkah-langkah Lobby.com](http://Langkah-langkahLobby.com)

Sekripsi Upik F Pendidikan Sejarah 2007. Halaman 312

Sitompul, Agus. 2008. *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Penerbit CV Misaka Galiza; Jakarta. Halaman VIII.

Sitompul, Agus.. *Loc. Cit*, Halaman VIII

Solichin. 2010. *HMI Candradimuka Mahasiswa*. Penerbit Sinergi Persadatama Foundation ; Jakarta. Halaman 64

Solichin. *Ibid*, Halaman 44

Ifian M Alfian. 2013. *HMI 1963-1966 Menegakkan Pancasila Ditengah Prahara*. Penerbit Kompas; Jakarta. Halaman 3

Solichin. *Op.Cit*, Halaman 93

Mortimer, Rex. 2011. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideologi dan Politik 1959-1965*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Halaman 24